

✓✓

## IDEOLOGI, MILITERISME, DAN MEDIA MASSA: REPRESENTASI LEGITIMASI DAN DELEGITIMASI IDEOLOGI

Studi Analisis Wacana Kritis Media Massa dalam Situasi Krisis  
di Indonesia pada Harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita  
Yudha* Periode 1965–1968

*Penelitian ini bertujuan mencari pemahaman utuh mengenai hubungan antara media massa, proses ideologisasi, dan dinamika militerisme dalam konteks politik masyarakat dunia ketiga, terutama dalam konteks Indonesia. Dengan paradigma kritis, penelitian ini memakai dua pendekatan metode yang ditempuh tahap, yaitu tahap framing dan analisis wacana kritis. Penelitian ini menemukan bahwa pada proses komunikasi krisis—terutama ketika kepentingan ideologi masuk dan menjadi penentu signifikan—media massa merepresentasikan kekuasaan militer yang represif dan koersif dalam proses konsolidasi ekonomi-politiknya.*

Selama tiga dekade lebih peristiwa 30 September 1965 oleh Orde Baru diberitakan media massa kepada masyarakat secara berat sebelah (Atmadji Sumarkidjo, 2000). Penyajian fakta yang terseleksi dan dirangkal sebaik-baiknya guna membenarkan atau melegitimasi dasar-dasar kelahiran Orde Baru. Monopoli alat dan media massa yang massif serta otomatis secara penuh, informasi dan konsep kebenaran tentang peristiwa 30 September 1965 maupun peristiwa-peristiwa sesudahnya—didominasi dan dihegemonikan Orde Baru.

Kebebasan berpikir individual maupun dalam bentuk media massa ditindas secara sistematis. Orang harus menerima mentah-

\*Penulis adalah koordinator penelitian kritis media di Pusat Kajian Sosial dan Komunikasi Strategis Jakarta. Selain itu ia dosen humaniora di Universitas Katolik Atma Jaya dan pengajar ilmu komunikasi di Universitas Mercu Buana. Artikel penelitian ini merupakan ringkasan tesis penulis untuk program pascasarjana Universitas Indonesia.

mentah informasi dan simbolisasi yang dibuat Orde Baru yang mencampuradukkan kebenaran dengan kebohongan.

Ketika reaksi balik atas fenomena itu mencuat, tantangannya adalah bagaimana merekonstruksi simbolisasi yang terdesepsi. Pada akhirnya usaha rekonstruksi informasi dan simbol itu sekedar *mirror image*; kebenaran tetap tidak dapat berpisah dengan mitos, atau setidaknya usaha rekonstruksi itu tidak bisa memisahkan mitos dengan kenyataan.

## ■ PERMASALAHAN

Penelitian memusatkan diri pada simpul utama representasi ideologis dan konteks sosial yang mempengaruhi produksi dan pemaknaan tekstual, terutama dalam konteks situasi krisis dan transisi sosial multidimensi pada tahun 1965-1968.

Surat kabar, terutama *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* telah memberikan beberapa pokok produksi teks yang sarat ideologis dan kepentingan membenaran serta peminggiran sosial kelompok tertentu saja. Artinya, kedua harian itu menciptakan dunia realitas—dalam konteks situasi krisis—sistem kebenaran simbolis yang menindas, penuh manipulasi dan sarat kepentingan politis.

Bagaimana pola pembingkalan teks media massa yang dipengaruhi proses legitimasi dan delegitimasi ideologi? Representasi krisis macam apa yang direkam media massa, terutama *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*? Bentuk representasi ideologi kapitalisme macam apa yang menjadi kecenderungan kedua harian itu? Mengapa ideologi dalam komunikasi krisis semacam itu akhirnya banyak mempengaruhi proses legitimasi dan delegitimasi dalam seluruh proses kognisi sosial masyarakat?

## ■ TUJUAN PENELITIAN

Tujuan akademis studi ini adalah mencari pemahaman utuh dan penjelasan yang relatif lengkap mengenai hubungan antara media massa, proses ideologisasi, dan dinamika militerisme dalam konteks politik masyarakat dunia ketiga, terutama dalam konteks Indonesia, yang belum banyak penelitian yang secara intensif menyoroti hal ini. Lagipula penelitian yang langsung masuk ke dinamika pers militer tahun 1960-an masih jarang.

Studi ini juga hendak mengungkapkan faktor-faktor tabu yang menyelimuti penelitian media massa era 1965-1968. Faktor-faktor

tabu itu adalah sejauh mana militer dalam seluruh proses perubahan sosial memanfaatkan media massa, terutama koran. Sejauh mana faksi militer memanfaatkan faktor hegemoni budaya—terutama ketika militer menggunakan media massa—dalam seluruh proses transisi politik di Indonesia?

Faktor tabu lain adalah bahwa penelitian ini juga ingin melihat hiperbolisasi realitas oleh *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata*. Tentu saja, hiperbolisasi realitas ini akan dikaitkan dengan pergulatan ideologi kapitalisme yang harus disadari bukan ideologi yang monolitik, melainkan multidimensional.

## ■ KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini memakai kerangka pemikiran ekonomi-politik media. Pendekatan ekonomi-politik memfokuskan diri pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri.

Dalam konstelasi di atas, tidak mengherankan apabila peran media di sini justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengendalikan media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas obyektif. Perjuangan kelas biasanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran media adalah menutupi dan merepresentasikan antagonisme itu secara bias dan manipulatif. Ideologi dimanfaatkan buat menghapus dan mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kelas dibuktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan kepentingan kelas yang dominan.

Penelitian teks media ini diletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa berpengaruh terhadap manusia (Littlejohn, 2002: 163-183). Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolis dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja, teks dimanfaatkan untuk memenangi pertarungan ide, kepentingan, atau ideologi kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media pada dirinya sudah ideologis (Littlejohn, 2002: 217).

Hubungan pertama yang perlu diterangi adalah kaitan antara media massa dengan ideologi (perspektif Althusser). Althusser menyatakan bahwa media dalam konteks ideologi modern banyak berperan sebagai *ideological state apparatus* (Eriyanto, 2001: 87-102). Dengan demikian, media massa berfungsi sebagai ranah dan dasar pembenaran praktik represi negara terhadap para warganya.

Hubungan kedua adalah bahwa media massa mampu melakukan proses penyapaan (Eriyanto, 2001: 98). Praksis penyapaan mengandung usaha penempatan individu dalam posisi dan relasi sosial tertentu. Hal ini juga termuat dan terintegrasi dalam seluruh proses ideologisasi.

Hubungan ketiga adalah media massa atau teks media mampu menjadi instrumen efektif-efisien untuk mendistribusikan dan mempanetrasi nilai atau wacana dominan dalam benak orang sehingga bisa menjadi konsensus kolektif. Proses hegemoni dalam produksi berita menjadi pola yang halus dan sering tidak disadari para konsumennya. Dalam proses produksi media massa, proses hegemoni ideologi bisa berjalan seakan wajar karena nilai-nilai itu tersamar dalam opini, teks berita yang dibuat secara logis, rasional, dan sistematis.

Hubungan keempat dalam perkembangan media modern, media justru juga mempunyai ideologi dan praksis hegemoni. Proses ekonomi-politik yang terdapat dalam pola produksi, konsumsi, dan distribusi media baru merupakan bagian yang integral. Nilai subyek dan lingkungan mampu dijadikan komoditas baru.

Setidaknya ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memahami hubungan ideologi dengan media. Pertama, ideologi tidak terdiri dari konsep yang terpisah dan terisolasi secara sosial. Ideologi mengartikulasikan elemen atau unsur yang berbeda menuju perbedaan makna. Kedua, statuta ideologis dibuat secara individual tapi ideologi sendiri tidak selalu produk kesadaran individual. Hal ini berarti bahwa ideologi sudah ada sebelum individu ada. Ideologi bersifat aktif dalam masyarakat. Transformasi ideologi merupakan proses kolektif. Ideologisasi lebih banyak berlangsung secara tidak sadar. Ketiga, ideologi bekerja melalui konstruk sosial untuk posisi subyek individual dan kolektif dari keseluruhan identifikasi dan pengetahuan yang ditransmisikan dalam nilai-nilai ideologis.

Pertimbangan penting dari konsep dominasi ideologis melahirkan—pada poin itu—teori yang menyatakan realitas hegemoni. Dari sekian banyak teori hegemoni, teori hegemoni Antonio Gramsci mempunyai kedudukan penting. Gramsci membangun teori tentang bagaimana akseptasi kelompok didominasi oleh dan dengan keberadaan kelompok dominan. Proses akseptasi itu berlangsung damai tanpa represi kekerasan.

Ini berarti bahwa proses kekuasaan dan dominasi tidak hanya material, tapi juga kultural.<sup>1</sup> Dominasi immaterial itu meliputi perluasan dan pelestarian “ketaatan sukarela” kelompok yang

didominasi oleh kelas elit penguasa melalui pemanfaatan kekuasaan intelektual, moral, dan politik. Melalui hegemoni, penyebaran atau distribusi ide, nilai, *belief system* dipenetrasikan secara "seakan-akan wajar." Dalam arti tertentu, ideologi yang hegemonik mengandaikan percampuran dengan praksis sosial.

Dominasi dan hegemoni memerlukan pertimbangan kedua, yaitu legitimasi. Legitimasi adalah wewenang keabsahan individu atau kelompok tertentu memegang mandat kekuasaan. Keabsahan di sini selalu diartikan sebagai sifat normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan berarti memperbandingkan wewenang dengan norma. Apabila sesuai norma yang berlaku, wewenang itu sah. Jika tidak, wewenang itu tidak sah.

Legitimasi mempunyai tiga kriteria pokok. Kriteria pertama adalah legitimasi sosiologis. Legitimasi sosiologis adalah legitimasi mekanisme motivatif yang membuat masyarakat menerima wewenang penguasa atau elit dominatif. Kriteria kedua adalah kriteria legalitas. Kriteria legalitas adalah kriteria legitimasi kesesuaian kekuasaan dengan hukum yang disepakati dan berlaku. Kriteria ketiga adalah kriteria legitimasi etis. Kriteria ketiga ini mempersoalkan kewenangan dan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral.

Legitimasi dan delegitimasi merupakan aksi sosial kompleks yang bisa dilakukan serta dipertegas melalui percakapan atau teks. Konteks legitimasi dan delegitimasi merupakan aktivitas diskursif dan menunjukkan bahwa melalui kegiatan persuasi, suatu wacana dapat menghasilkan efek perubahan format perilaku dan ideologi dominan kelompok tertentu. Dalam konstelasi semacam ini, wacana dapat dilihat sebagai medan konflik ideologi kelompok dominan dengan kelompok subdominan dalam masyarakat. Setiap kelompok bersaing dan berlomba memenangi wacana, perspektif, dan klaim kebenaran masing-masing. Dalam perlombaan semacam ini strategi legitimasi dan delegitimasi diimplementasikan dalam bentuk representasi diri positif dan representasi diri negatif. Van Dijk (1998: 100-136) pernah menyatakan bahwa delegitimasi dalam level wacana dilakukan ketika perangkat represif dan koersif tidak efektif meminggirkan wacana-wacana alternatif.

Strategi delegitimasi dapat dilakukan dengan memakai beberapa cara. Pertama, dengan fokus konteks produksi, akses, dan penggunaan wacana. Dalam perang wacana kelompok dominan kerap kali mempraktikkan strategi ini dengan menggugat legitimasi kelompok subdominan serta menegasi peran-legalitas-latar

belakang-pengetahuan dan visi anggota kelompok subdominan. Peran media massa dalam hal ini berfungsi menghalangi akses kelompok delegitim ke dirinya atau merepresentasikan aktivis-aktivis perubahan sebagai sumber-sumber berita yang *unreliable*.

Kedua, delegitimasi juga dipraktikkan dengan fokus unsur-unsur negatif sebuah wacana, penekanan pelanggaran terhadap nilai umum, atau deskripsi negatif terhadap pihak tertentu. Dalam situasi semacam ini, wajar bila dalam domain berita politik, kelompok-kelompok subdominan tidak pernah dibiarkan mendominasi sumber pemberitaan dan wacana berita yang terbentuk.

Ketiga, delegitimasi juga dapat ditempatkan pada isu kemungkinan-kemungkinan efek wacana. Dapat saja delegitimasi dilakukan dengan penayangan posisi berita di halaman depan, sisi halaman yang tidak menarik, menghambat proses produksi wacana, mempersulit distribusi media dan lain-lainnya.

Strategi legitimasi dan delegitimasi sangat efektif bila mampu berasosiasi dengan akal sehat, norma, dan ideologi yang berlaku secara umum. Wajar bila dalam kepentingan ini kelompok dominan cenderung mengontrol institusi yang mempunyai akses terhadap ilmu pengetahuan dan opini publik. Institusi ilmu pengetahuan dan opini publik mempunyai otoritas yang kuat bahkan dapat disebut sebagai pusat "klaim kebenaran," karena institusi itu mempunyai hasil atau produk yang *incontrovertible*, dapat diandalkan, dan ilmiah—bukan semata-mata karena mereka mempunyai akses utama terhadap media massa atau wacana publik.

Dalam konteks pembahasan di atas, setidaknya ada beberapa titik kritis dalam hal ini yang bisa diungkapkan. Titik kritis pertama adalah pemahaman tentang fakta yang diangkat media atau teks berita. Fakta yang diangkat oleh media lebih banyak dipahami sebagai fakta semu. Maka dapat dikatakan berita cenderung merupakan ranah pergulatan wacana antara pelbagai ideologi wartawan atau media. Set fakta yang dibuat dalam media massa lebih merupakan area kepentingan sosial yang berkonflik.

Titik kritis kedua adalah posisi media itu sendiri. Titik kritis ini hendak mengatakan bahwa media adalah instrumen elit untuk menyebarkan ideologi dominan (David Barrat, 1994: 48-52). Media dan berita media massa adalah subyek yang mengkonstruksi realitas melalui simbol dan pemaknaan, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya.

Titik kritis lainnya adalah politik simbol dan pemaknaan yang dibuatnya. Makna tidak dipengaruhi struktur tapi lebih banyak dibentuk praksis pemaknaan yang ada dalam masyarakat. Media massa menentukan definisi realitas melalui pemilihan simbol dan bahasa yang tepat. Masalah penting yang ditemukan paradigma kritis dalam konteks ini adalah siapa yang memegang kendali dalam proses definisi dan pemaknaan realitas oleh media massa? Dalam struktur sosial, kelompok mana yang lebih banyak diuntungkan dalam pemaknaan dominan? Siapa yang mendefinisikan apa? Kelompok mana yang terus-menerus menjadi obyek penderita dalam proses pemaknaan seperti itu?

Pada era 1965-1968 terlihat bahwa perspektif pemanfaatan media massa menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural. Perspektif fungsionalisme struktural menjelaskan begitu banyak kegiatan yang melembaga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pers. Masyarakat merupakan sistem dan media massa adalah subsistem di dalamnya. Media diharapkan menjadi fungsi integrator, dinamisator, adaptor, dan motivator masyarakat. Ini berarti media harus memampukan diri menjadi alat respon yang tepat bagi realitas yang sebenarnya.

Media dipandang berfungsi sebagai cermin yang menceritakan realitas secara obyektif. Dalam kaitan ini koran atau surat kabar era 1965-1968 berada dalam situasi yang sangat kritis. Di satu pihak pers Indonesia sedang bertumbuh ke arah jurnalsme yang profesional. Di lain pihak ia juga ditarik agar tetap menjadi pers politik yang berada dalam situasi krisis.

Masalahnya adalah *balance news*. Banyak pemberitaan tentang situasi krisis memuat ragam sumber yang relevan. Ketika beberapa surat kabar hanyalah sikap wartawan atau mengutip atau diberikan pernyataan sumber berita yang mendukung kepentingan tertentu, bagaimana nilai pemberitaan yang seimbang? Bagaimana kalau memang terjadi monopoli pemberitaan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kekuatan memaksa? Apakah memang benar terjadi manipulasi pemberitaan pada era 1965-1968 sehingga opini publik terbentuk karena pers secara tidak seimbang memuat versi Dinas Penerangan Angkatan Darat?

Dalam situasi krisis media sering tidak berfungsi sebagai mediator, tapi digunakan menebarkan sikapnya mengenai "suatu hal" kepada publik (McQuail, 1994). Hal ini bisa menjebak menjadi media propaganda. Dalam konteks 1965-1968, apakah memang terjadi proses dominasi dan hegemoni yang pada akhirnya

menjadikan pers Indonesia pada waktu itu menjadi koran propa- ganda, terutama untuk Angkatan Darat? Di mana letak kebebasan pers yang diperjuangkan? Dalam situasi krisis, bagaimana kita harus mengartikan dan mengimplementasikan kebebasan pers?

## ■ METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dengan paradigma kritis. Paradigma kritis meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Asumsi realitas paradigma kritis adalah realitas tidak netral, namun dipengaruhi dan terikat nilai serta kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Oleh sebab itu, proyek utama paradigma kritis adalah pembebasan nilai dari dominasi kelompok penindas. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana paradigma kritis membedah realitas dalam penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya analisis kritis tentang teks media. Penelitian paradigma kritis mengutamakan juga analisis yang menyeluruh, kontekstual dan multilevel. Ini berarti penelitian kritis menekankan *historical situatedness* dalam seluruh kejadian sosial yang ada (Denzin, 2000: 170).

Asumsi dasar paradigma kritis adalah keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengendalikan proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat ada "realitas" di balik kontrol komunikasi masyarakat. Masalahnya, siapa mempunyai kekuatan kontrol itu? Mengapa mengontrol? Ada kepentingan apa? Dengan beberapa kalimat pertanyaan itu terlihat bahwa teori kritis melihat ada dominasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam seluruh proses komunikasi masyarakat. Ini menyatakan bahwa proses penyebaran dan aktivitas komunikasi massa sangat dipengaruhi struktur ekonomi-politik masyarakat itu.

Selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi oleh media dalam struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran (*manufactured consent*). Dengan demikian, media menyediakan pengaruh guna mereproduksi dan mendefinisikan status atau memapankan keabsahan struktur tertentu. Inilah mengapa media dalam kapasitasnya sebagai agen sosial sering mengandaikan juga praksis sosial dan politik.

Reproduksi realitas dalam media pada dasarnya dan umumnya sangat dipengaruhi bahasa (Littlejohn, 2002: 210-211), simbolisasi pemaknaan, dan politik penandaan. Bahasa di samping sebagai

realitas sosial, tetap bisa dilihat sebagai sistem penandaan dalam arti bahwa bahasa atau suatu realitas menandakan realitas lain (peristiwa atau pengalaman hidup manusia).

Dengan demikian, sebuah realitas dapat ditandakan secara berbeda pada peristiwa yang sama. Atau, dapat dikatakan bahwa pemaknaan yang berbeda bisa dilekatkan pada peristiwa yang sama. Masalah terjadi ketika makna yang ditafsirkan dan dikonstruksi ulang kelompok tertentu atas peristiwa yang sama itu cenderung mendominasi penafsiran. Bagaimana mungkin makna tertentu bisa lebih unggul dan lebih diterima dibandingkan pemaknaan lainnya?

Kedua, bahasa dalam konteks wacana—terutama wacana komunikasi—sebetulnya mencakup pengiriman pesan dari sistem saraf satu orang kepada yang lain dengan maksud menghasilkan makna sama dengan yang ada dalam benak si pengirim<sup>2</sup> (Tubs & Moss, 1994: 66). Pesan verbal selalu memakai kata. Kata selalu merujuk keberadaan bahasa. Ini berarti kita sepakat bahwa kita menggunakan simbol bahasa dalam aktivitas komunikasi.

Ketiga, politik penandaan lebih banyak bermakna pada soal praksis sosial pembentukan makna, kontrol, dan penentuan makna tertentu. Peran media massa dalam praksis sosial penentuan tanda dan makna tidak melepaskan diri dari proses kompetisi ideologi. Relasi dominasi dan kompetisi ideologis tidak berproses pada tataran aparatur kelompok dominan saja, tapi juga melalui produksi dan reproduksi kekuasaan yang berada dalam ruang budaya—tempat makna hidup disusun. Pada proses inilah terungkap bahwa produksi-konstruksi realitas menghubungkan dimensi politik wacana dengan dimensi politik ruang<sup>3</sup> (M. Shapiro, 1992: 1-6). Ini karena dalam ruang tertentu saja praksis wacana lahir dari sejarah dominasi dan kompetisi kultur yang panjang hingga dimenangnya kompetisi oleh kekuatan paling dominan dan hegemonis yang pada gilirannya menentukan rekayasa politik wacana.

## ■ METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai dua pendekatan metode yang ditempuh tahap, yaitu tahap *framing* dan analisis wacana kritis. Adapun model analisis *framing* yang dipakai adalah model Robert Entman. Perspektif *framing* Entman digunakan mendeskripsikan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. *Framing* Entman memasukkan dua dimensi besar dalam teks media, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek tertentu realitas. Dalam perspektif Entman, *framing* isi media meliputi pendefinisian masalah,

praktraan masalah, pembuatan keputusan moral, dan penekanan penyelesaian. Pada jenjang teks, penelitian menitikberatkan diri pada tajuk rencana, kepala berita, dan kolom editorial dalam harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*.

#### Bagan Elemen dalam Framing Robert Entman

<b>Define problems</b> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<b>Diagnose causes</b> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<b>Make moral judgement</b> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<b>Treatment recommendation</b> (penekanan penyelesaian masalah)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Eriyanto, 2002: 188-189)

Penelitian tahap kedua memakai metode analisis isi secara kualitatif dengan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Kerangka besar analisis wacana kritis dalam penelitian ini menggunakan model Norman Fairclough.

#### ■ ANALISIS SOSIO-KULTURAL MAKRO

Ada beberapa tema besar yang bisa dimasukkan ke diskursus makro politik Indonesia. Pertama adalah diskursus suhu politik Indonesia dalam kanevas perang dingin setelah Perang Dunia II selesai. Faktor tema pertama ini membawa Indonesia pada arena persaingan hegemonis antara negara-negara penganut ideologi kapitalisme dengan faksi-faksi negara penganut ideologi sosialisme-komunisme.

Tema kedua adalah eksperimen demokrasi Indonesia. Setidaknya, eksperimen ini merupakan proses ekonomi-sosial yang semestinya menjadi ajang pembelajaran politik Indonesia kontemporer setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda tahun 1949. Tapi di lain pihak, eksperimen ini juga membawa pengaruh negatif yang tidak sedikit bagi rakyat. Misalnya, ketidakstabilan politik dan maraknya pemberontakan militer daerah.

Hal lain yang penting adalah dinamika hubungan antara penguasa politik sipil dan kecenderungan pemimpin militer Indonesia untuk turut berkepentingan dalam seluruh proses politik masyarakat waktu itu. Dalam tema kedua ini sesungguhnya ada beberapa pemeran penting, yaitu Presiden Soekarno, faksi-faksi militer yang ada di Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan pihak-pihak yang berafiliasi pada kepentingan kapitalisme di Indonesia.

Tema ketiga adalah peristiwa G 30-S. Tema ini memicu pergantian rezim sekaligus menjadi acuan pokok delegitimasi terhadap kelompok komunis di Indonesia. Tema ini juga menjadi antiklimaks bagi sistem politik demokrasi terpimpin yang ditawarkan Presiden Soekarno pada waktu itu.<sup>4</sup> Peristiwa G 30-S ini awal peristiwa yang sengaja dikaburkan oleh rezim Orde Baru.

Tema keempat adalah delegitimasi terhadap peran Soekarno dalam sistem politik. Proses peminggiran Soekarno juga merupakan proses berjalannya proses legitimasi terhadap sistem kapitalisme di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa diskursus besar dalam pembentukan opini publik di tahun 1965 sampai tahun 1968 adalah tentang proses ideologisasi kapitalisme liberal. Sementara itu delegitimasi terhadap peran sosial politik Soekarno merupakan titik pijak yang harus dilalui jika ideologisasi kapitalisme liberal mau berhasil.<sup>5</sup> Meskipun demikian, wacana kapitalisme dalam tema keempat ini tidak bermuka satu, melainkan banyak. Inilah yang menyebabkan opini kapitalisme di Indonesia tidak monolitik.

#### ■ ANALISIS PRAKSIS WACANA :

Pendirian dan pembentukan *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata* tidak bisa dipisahkan dari situasi politik dan ekonomi pada waktu itu. Secara khusus, pembentukan dua harian yang dikelola faksi militer itu merupakan tanggapan aktif terhadap pembubaran dan pemberangusan harian-harian yang berafiliasi dengan Badan Pendukung Soekarnoisme.

Pada tanggal 15 Maret 1965 *Angkatan Bersenjata* diterbitkan di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Sugandhi dan Letnan Kolonel Jusuf Sirath. *Angkatan Bersenjata* merupakan harian militer yang dikoordinasikan kepala penerangan umum markas besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Harian ini diterbitkan guna menandingi dan menyediakan alternatif wacana media massa yang dibentuk Partai Komunis Indonesia.

*Berita Yudha* sebetulnya tidak terkonsentrasi di Jakarta, atau dapat dikatakan bahwa *Berita Yudha* juga diterbitkan markas-

markas komando militer daerah setempat. Terdapat juga edisi-edisi *Berita Yudha* daerah yang tentu saja dilindungi pejabat-pejabat angkatan darat setempat. *Berita Yudha* edisi Jakarta sesungguhnya dihasilkan dari pengambilalihan harian Berita Indonesia.

Dengan demikian, sebetulnya para wartawan *Berita Yudha* adalah tenaga-tenaga Berita Indonesia. *Berita Yudha* sendiri adalah harian militer yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Republik Indonesia. *Berita Yudha* secara resmi terbit sejak 9 Februari 1965 dipimpin Brigadir Jenderal Ibnusubroto, Sukarno Wibowo, Daradjad, Brigadir Jenderal Nawawi Alif, serta Mohammad Moedasir.

## ■ ANALISIS TEKS

Pada tataran teks mikro penelitian mendapatkan beberapa pembingkai oleh *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*. Secara umum ada empat pembingkai, terutama yang banyak tertuang dalam tajuk rencana mereka. Pembingkai itu meliputi "Peristiwa G 30-S sebagai Kasus Politik Kontrarevolusioner," "Kelompok komunis sebagai Lawan dan Kelompok Jahat," "Krisis Kepemimpinan Politik Kabinet Dwikora," serta "Pemulihan Politik dan Ekonomi."

### Bingkai I

<i>Problem Identification</i>	Masalah politik mengakibatkan krisis nasional yang parah, terutama krisis sosial politik dan kepemimpinan.
<i>Causal Interpretation</i>	Siapa saja yang terlibat dengan kelompok G 30-S yang selanjutnya disebut angkatan darat sebagai Gestapu. Angkatan darat, para jenderal dan presiden merupakan korban konspirasi makar politik yang dilakukan.
<i>Moral Evaluation</i>	Kelompok G 30-S secara etis atau moral dipersalahkan, terdapat fitnah sistematis dan penculikan serta pembunuhan yang terencana.
<i>Treatment Recommendation</i>	Dislesaikan secara politis, kalau perlu dikikis habis sampai ke akar-akarnya.

**Bingkai II**

<i>Problem Identification</i>	Kelompok komunis merupakan kelompok politik yang secara tegas menolak keberagaman ideologi di Indonesia, dengan demikian menolak keberagaman masyarakat Indonesia. Kelompok komunis adalah kelompok petualang politik yang terlalu berani memalinkan teror politik atas masyarakat.
<i>Causal Interpretation</i>	Secara keseluruhan, kelompok komunis ditafsirkan sebagai kelompok kepentingan yang memancing di air keruh atas situasi politik Indonesia.
<i>Moral Evaluation</i>	Kelompok komunis digambarkan sebagai kelompok yang jahat, tidak berperikemanusiaan, secara moral bejat, para wanita komunis digambarkan sebagai pelacur murahan. Kelompok komunis adalah kelompok yang secara sepihak "menusuk dari belakang" jalannya revolusi Indonesia.

**Bingkai III**

<i>Problem Identification</i>	Masalah yang menyertai krisis kepemimpinan Soekarno adalah ketidakstabilan politik yang mengakibatkan ketidaktertiban dan situasi yang buruk bagi keamanan nasional.
<i>Causal Interpretation</i>	Kalau mau lebih pendek, dapat dikatakan bahwa seluruh permasalahan Indonesia waktu itu adalah Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunismenya. pemerintahan sipil Soekarno yang tidak memihak kepentingan kesejahteraan sosial, Presiden Soekarno sendiri dengan seluruh ajaran Nasakom dan praksis politiknya yang mendasarkan diri pada demokrasi terpimpin yang sangat berbau sosialisme.
<i>Moral Evaluation</i>	Secara moral, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan sipil Soekarno disebabkan oleh sekian rangkaian krisis ekonomi, sosial, dan politik menyebabkan delegitimasi kekuasaan Presiden.
<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam konteks krisis kepemimpinan pemerintah sipil pimpinan Presiden
<i>Problem Identification</i>	

**Bingkai IV**

<i>Problem Identification</i>	bahwa permasalahan dan krisis negara bersumber pada masalah ekonomi dan politik.
<i>Causal Interpretation</i>	Masalah kebobrokan ekonomi-politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pilihan mendasar pemerintahan sipil Soekarno yang terlalu menekankan iklim dan pilihan politik demi kepentingan politik kepentingan Orde Lama. Penyebab lain adalah kesalahan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi-politik Indonesia.
<i>Moral Evaluation</i>	Pemulihan ekonomi dan sosial-politik Indonesia pascaperistiwa G 30-S dan krisis legitimasi Soekarno berikut ajaran-ajarannya merupakan keharusan moral elit Indonesia baru.
<i>Treatment Recommendation</i>	Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan, persoalan ekonomi merupakan saka guru perbalkan situasi nasional, persoalan ekonomi merupakan pertimbangan utama pembangunan nasional setelah peristiwa G 30-S, persoalan ekonomi adalah dasar legitimasi kepemimpinan yang ditawarkan oleh faksi militer.

**■ ANALISIS INTERTEKSTUALITAS**

Salah satu unsur dalam perwacanaan penelitian ini terletak pada keterkaitan antar teks, terutama di dalam teks mikro. Setiap rangkaian teks media dilihat sebagai rantai komunikasi yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Dalam *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* terlihat bahwa kedua harian itu memakai rangkaian komunikasi sebagai langkah pembingkaihan isu atau topik yang ditawarkan kepada masyarakat. Tentunya, masalah intertekstualitas dapat dilihat dalam aspek manifest *intertextuality*.

Ada beberapa unsur dalam proses intertekstualitas. Pertama yang menonjol adalah jenis pengandaian (*presupposition*). Intertekstualitas jenis ini lebih banyak melihat proposisi teks yang diterima pembuat teks siap ditempatkan sebagai sesuatu yang dipandang benar dan diletakkan dalam organisasi teks secara keseluruhan. Presuposisi itu mempengaruhi opini publik yang tergalang memberikan dukungan atau setidaknya melegitimasi segala tindakan yang mengacu surat keputusan atau pengumuman presiden itu.

Kedua, dalam konteks intertekstualitas juga terlihat bahwa *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata* melakukan representasi wacana. Representasi wacana ini terlihat dengan rujukan pada istilah bagaimana sebuah peristiwa dilaporkan kepada khalayak.

Ada beberapa ragam representasi peristiwa yang digambarkan oleh *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*. Tipe pertama adalah posisi pertama dalam hal pelaporan peristiwa atau pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tertentu. Tajuk rencana *Berita Yudha* tanggal 4 dan 7 Oktober 1965 merupakan contoh paling jelas bahwa harian itu mengambil posisi sebagai bagian yang terlibat langsung dalam usaha menolak dan mengingkari Gerakan 30 September. Tipe kedua adalah posisi kedua yang menempatkan diri sebagai orang kedua jamak. Dalam setiap tajuk atau editorial, terutama yang berkaitan dengan faksi komunis atau faksi Orde Lama, kedua harian mengambil posisi sebagai "kita." Ini menandakan bahwa kedua harian mengambil posisi sebagai pihak yang sama dengan masyarakat atau kelompok yang antikomunis. Tipe ketiga adalah posisi sebagai pihak ketiga jamak untuk mempertajam kubu atau bipolarisasi dalam masyarakat.

Bentuk ketiga intertekstualitas dalam *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* adalah **bentuk negasi**. Bentuk negasi dalam proses intertekstualitas adalah bentuk kalimat negasi yang banyak digunakan untuk tujuan polemik. Kalimat negasi dalam beberapa teks tertentu mengandaikan negasi pada teks yang lain.

Bentuk keempat intertekstualitas yang jelas dalam *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* adalah **metadiskursus**. Ragam keempat ini membuat sebuah teks ada pada tingkatan yang berbeda dan membuat jarak teks tertentu dengan tingkat teks lain. Dapat dikatakan bahwa metadiskursus adalah penampilan pembicara teks dalam situasi yang dominan dan memposisikan obyek pada kelompok yang tidak dominan atau menjadi obyek yang didefinisikan.

Pemberian definisi secara sepihak sering dilakukan *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*. Media-media ini menyebut kelompok komunis yang mencoba memberontak dengan "Gestapu," atau Gerakan September 30, yang merujuk kelompok intel kejam zaman Nazi Jerman, atau "kelompok kontrarevolusioner," yaitu kelompok yang mengkhianati revolusi Indonesia. Media massa yang berafiliasi dengan militer ini juga menyebut politikus sipil simpatisan komunis dengan sebutan "para durno" atau "kelompok durnoisme." Tidak jarang *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* menyebut kelompok era Soekarno sebagai "Orde Lama yang bobrok."

## ■ DISKUSI DAN BEBERAPA KESIMPULAN SEMENTARA

Pertama, pola pembingkai dalam serial editorial dan beberapa teks utama yang ada dalam *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata* memakai pola alterasi-konflik-negasi dan legitimasi.

Artinya, konflik terhadap PKI diangkat sebagai bingkai konflik terhadap ideologi sosialisme-komunis, bingkai konflik terhadap sistem pemerintahan sipil yang korup dan secara moral tidak legitim lagi, bingkai penyadaran pemulihan ekonomi sebagai usaha melegitimasi kapitalisasi Indonesia sekaligus mendelegitimasi praktik ekonomi yang terlalu percaya pada diri sendiri, bingkai delegitimasi kekuasaan kepresidenan yang tidak dilakukan secara frontal tapi mengerosi sumber-sumber legitimasi sosial politik Presiden Soekarno, dan bingkai pembangunan ekonomi yang lebih pragmatis demi kepentingan rakyat.

Dalam konteks ideologisasi, jelas pola pembingkai tersebut telah melakukan apa yang disebut dengan konteks interpelasi atau tindakan penyapaan. Interpelasi dalam *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* menempatkan faksi militer sebagai faksi yang berkepentingan memperbaiki situasi yang krisis di satu sisi, tapi juga menempatkan faksi kekuatan lawan (dalam hal ini Presiden Soekarno, faksi komunis, faksi politikus sipil yang oportunis) sebagai faksi yang jelas-jelas mengkhianati mandat atau kepercayaan atas kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka.

Kedua, masalah ideologisasi yang tersirat dalam pembingkai ternyata tidak melulu memperlihatkan perlawanan terhadap ideologi komunisme, tapi juga proses tarik ulur mendefinisikan warna kapitalisme di Indonesia. Dalam teks-teks editorial sering terjadi pandangan negatif terhadap kapitalisme liberal, padahal di sisi lain, jelas dikatakan bahwa Indonesia dinyatakan bergantung kepada kapitalisme global. Ini berarti wacana ideologi yang dibingkai atau diseleksi kedua harian itu bukan bipolaristik karena di sana-sini ditunjuk secara jelas pertarungan wacana ideologi kapitalistis itu sendiri. Setidaknya yang terlihat adalah wacana kapitalisme global dengan wacana kapitalisme birokratis nasional.

Hal lain yang menarik adalah jelas bahwa dalam dinamika redaksional sendiri terasa dinamika faksional kapitalisme Indonesia. *Berita Yudha* condong pada faksi militer kapital yang cenderung pragmatis dalam menyikapi pola pemulihan ekonomi. Pragmatisme ekonomi-politik ini terjadi karena faksi militer ini condong pada faksi Soeharto yang mempunyai lingkaran kelompok kapitalisme pasar dengan dukungan pemegang modal nasional yang berorientasi

pada relasi ekonomi pasar. Memang hal ini tidak absolut untuk dipercayai karena sikap faksi militer Soeharto juga baru melakukan konsolidasi kapital dengan para pemilik modal yang berorientasi pada relasi ekonomi nasional.

*Angkatan Bersenjata* lebih kompleks dalam bersikap. Dalam setiap editorial, harian ini tidak begitu jelas dan tetap mendukung faksi militer kapital tertentu. Kadang *Angkatan Bersenjata* lebih dekat dengan lingkaran Nasution, tapi di lain waktu *Angkatan Bersenjata* juga berperanan penting dalam proses propaganda faksi militer kapital pimpinan Soeharto.

Arena berita yang tidak bipolaristik secara ideologis menjadikan *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* berkesan belum menemukan proses identifikasi ideologi yang matang. Meskipun di sana-sini terdapat kemenduaan sikap ideologis dalam seluruh isi media yang dihasilkan, tapi sangat terlihat jelas bahwa dua media itu melakukan aliansi taktis dengan elit politik yang tengah melakukan konsolidasi politik. Ini bisa dipahami karena situasi ekonomi-politik Indonesia sendiri belum terbentuk secara matang.

Ketiga, masalah yang selalu menjadi bahan diskusi dalam isi media adalah soal obyektivitas pemberitaan. Dari sekian pembingkaihan yang dilakukan oleh kedua harian faksi militer, terlihat bahwa nilai obyektivitas perlu didiskusikan lebih mendalam, terutama ketika harus merumuskan obyektivitas realitas dalam waktu krisis. Obyektivitas pemberitaan yang diangkat oleh *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata* mempunyai beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Obyektivitas situasi krisis akan sangat ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa atau setidaknya yang mempunyai akses yang luas terhadap penyebaran arus informasi. Maka yang perlu dilihat adalah sejauh mana *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata* merekonstruksi obyektivitas pemberitaan yang ada. Ada sejumlah fakta yang memang memenuhi syarat kalau disebut sebagai realitas yang obyektif. Tapi masalahnya adalah ketika obyektivitas itu "dimanfaatkan" untuk mengusung kepentingan subyektif kelompok atau ideologi tertentu.

Pertimbangan ekonomi-politik sangat mewarnai konteks proses pembingkaihan teks media, terutama ketika kedua harian itu dipakai untuk melegitimasi ideologi baru dan mendelegitimasi ideologi yang sudah bangkrut. Dalam hal ini, kedua harian itu telah berhasil membuat ruang konsensus sosial terhadap isu-isu tertentu. Keberhasilan ini tidak berhenti begitu saja tapi pembingkaihan itu juga membuat ruang kontroversi dan menentukan ranah

penyimpangan dalam wacana yang berkembang dalam masyarakat dan sejarah Indonesia. Keterbatasan oplah media dan kertas surat kabar tidak menutup efektivitas kedua harian itu dalam membentuk wacana legitimasi dan delegitimasi. Penelitian ini mencoba membuka pada pemikiran bahwa efektivitas kedua harian itu disebabkan pula oleh pola komunikasi dua tahap dan tradisi lisan yang masih menghinggapi sebagian besar masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata media massa bisa terjebak pada situasi di mana media massa dipaksa untuk menjadi media massa patriotik. Terutama dalam situasi krisis, jurnalisme media massa bisa tergoda untuk masuk pada tataran *embedded journalism* demi mengejar tuntutan obyektivitas pemberitaan atau mengejar tuntutan moral krisis nasional yang dialami. Masalahnya adalah sejauh mana jurnalisme media massa tetap mengambil jarak dalam merekonstruksi pemberitaan yang sangat diokupasi dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan dan ketertiban. Pembungkalan yang dilakukan oleh *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* merupakan contoh paling jelas dan kasar dari penerapan atas apa yang disebut *embedded journalism*, terutama dalam konteks komunikasi krisis.

Diskusi lainnya adalah makna kebebasan pers itu sendiri. Dari beberapa pendapat dan anggapan yang berkembang pada para agen media menyebutkan bahwa periode tahun 1965 sampai 1968 adalah periode bulan madu media dengan pemerintah Indonesia waktu itu. Yang perlu didiskusikan adalah apakah memang terjadi hubungan yang serasi antara media massa dengan rezim penguasa waktu itu? Memang benar bahwa beberapa pers Indonesia mengalami hubungan yang harmonis dengan rezim kepentingan tapi masalahnya ada *trade off* yang harus pers bayar, yaitu loyalitas dengan rezim militeristik waktu itu. Masalahnya adalah kontrol pers dari militer yang sedemikian kuat. Apalagi dengan kebijaksanaan "uang ketat" yang dilakukan oleh rezim baru waktu itu dalam rangka pemulihan ekonomi yang carut marut. Apabila segala macam sumber informasi dimanfaatkan untuk memulihkan keamanan dan krisis sosial politik oleh pihak militer maka pers harus membayar kebebasan persnya untuk turut "membantu" proses pemulihan itu. Di mana persis posisi kebebasan pers dalam konteks komunikasi krisis?

Ada beberapa kesimpulan umum yang bisa ditarik dari seluruh konstelasi konteks dan teks yang diperoleh dalam penelitian ini.

Pertama, bahwa proses pembingkaihan isu dan topik yang berpengaruh pada opini publik masyarakat Indonesia waktu itu sangat dipengaruhi oleh proses legitimasi ideologi baru. Dalam proses legitimasi ideologi baru, maka terdapat bahwa *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* membingkai kerangka ideologi. Setidaknya ada kesan bahwa pola ideologisasi media massa melalui proses ideologisasi kelompok kemudian menjadi alat represif ideologisasi dan pada akhirnya media itu menawarkan ideologi negara. Dalam hal ini, pertarungan legitimasi dan delegitimasi ideologi tidak terbatas pada ideologi kapitalisme dengan sosialisme-komunis tapi juga pertarungan legitimasi kapitalisme global dengan kapitalisme nasional-birokrat yang sangat mewarnai sistem dan struktur ekonomi Indonesia.

Kedua, sangat jelas bahwa *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* menggunakan strategi penyeleksian isu, taktik pencarian sumber masalah yang sering dimunculkan dalam bentuk pengkambinghitaman kelompok tertentu, penonjolan akibat destruktif masalah yang bersangkutan, penilaian moral yang selalu menyertai akibat dan rekomendasi tindakan penyelesaian yang berpihak pada kelompok kepentingan.

Ketiga, pembingkaihan kedua harian militer rupanya mengarahkan opini publik dalam tiga ragam strategi antara, yaitu strategi opini, strategi kontroversi dan strategi moral. Strategi opini di satu sisi melakukan pembusukan kepada kelompok komunis atau kelompok kontrarevolusi tapi di lain pihak menggiring pendapat bahwa kelompok militer (faksi Soeharto) merupakan kelompok "penyelamat" masyarakat. Strategi kontroversi menarik dua kutub yang berlawanan, yaitu kelompok "baik" (kelompok angkatan darat, masyarakat) dan kelompok lawan atau kelompok "jahat" yang menyebabkan kesengsaraan dan kekacauan. Strategi moral mengarahkan nilai, cara pandang, sistem nilai dan ideologi tertentu.

### ■ IMPLIKASI TEORITIS

Pada tingkat akademis, penelitian ini menemukan bahwa pada proses komunikasi krisis terutama ketika kepentingan ideologi masuk dan menjadi penentu signifikan, media massa merepresentasikan kekuasaan militer yang represif dan koersif dalam proses konsolidasi ekonomi-politiknya. Dapat dikatakan bahwa pada kasus Indonesia, momen *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* tahun 1965 - 1968 adalah contoh paling jelas

penerapan prinsip *ideological state apparatus* dan *represif state apparatus*. Dalam kadar tertentu media massa merepresentasikan realitas yang membawa pada kesadaran palsu. Masalahnya adalah kesadaran palsu itu menjadi konsensus sosial yang secara kolektif disetujui masyarakat.

Persekongkolan media massa dengan faksi militer membuahkan spiral rangkaian kekuasaan yang mampu mengendalikan emosi bahkan histeria massa, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia dalam kurun waktu dan situasi tertentu. Argumentasi tersebut sudah bisa memberikan penegasan bahwa media massa mampu menjadi sarana penyebaran dan hegemonisasi ideologi. Ini berarti media massa adalah garda paling depan alat ideologi negara atau alat represif ideologi. Padahal di sisi lain, media massa diharapkan menjadi alat kritik dan pengawasan sosial masyarakat terhadap negara. Sekali lagi diteguhkan bahwa media massa merupakan alat yang tidak bebas nilai. Dengan kata lain, bahwa media massa harus menjadi pilar keempat demokrasi tidak sepenuhnya bisa begitu saja diakomodasi oleh media massa. Memang dalam kondisi normal media massa diperlukan untuk proses demokratisasi.

Akan tetapi di lain pihak, perlu disadari pula media massa bisa berubah menjadi raksasa mengerikan dalam melegitimasi praktik-praktik kebohongan sistem politik atau ideologi tertentu. Persoalan ekonomi-politik kritis menjadi faktor signifikan yang bisa diungkap untuk membongkar topeng-topeng ideologis yang ada di balik signifikansi media dalam kehidupan manusia modern. Elaborasi teori ekonomi-politik media memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami perubahan sosial politik yang otoriter menjadi demokratis, juga sebaliknya dari sistem yang demokratis berubah menjadi sistem ekonomi-politik yang otoriter.

Kedua adalah implikasi metodologis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Salah satu kriteria penilaian keberhasilan dari penelitian ini adalah kemampuan menemukan latar sejarah yang tepat, menginterpretasikan latar itu sebagai konteks teks-teks yang ada dan akhirnya menemukan benang merah pembungkahan teks. Sisi lainnya penelitian ini sudah mengambil posisi memihak "korban" teks-teks itu. Dari opsi preferensial ini, penelitian mengacu pada pendekatan komunikasi selain pendekatan linguistik atau kesejarahan. Faktor kesejarahan dan komunikasi kental menjadi alat efektif mengungkap apa saja yang dirasa "tersembunyi" dalam setiap teks.

Itu mengakibatkan, penelitian memang harus mengambil sikap multidisipliner.

Pemahaman yang tepat bagi penelitian selanjutnya adalah bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil awal untuk menjejaki sejarah komunikasi atau salah satu episode peran media massa bagi pembangunan Indonesia. Selain masih ada keterbatasan metode dalam proses penelitian, juga dirasakan bahwa diskursus relasi media massa dengan militer, ideologi kapitalisme, dan situasi krisis menerbitkan permasalahan-permasalahan baru, terutama ketika kapitalisme global menjadi faktor penentu kekuatan militer, sosial-politik negara, dan krisis yang dialami komunitas tertentu.

## ■ DAFTAR PUSTAKA

### ■ Buku, Jurnal, dan Disertasi

- Abar, Akhmad Zaini (1995). *Kisah Pers Indonesia 1966—1974*. Yogyakarta: LKIS
- Anderson, Benedict dan Ruth T. McVey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*. New York: Cornell University.
- Berger, Arthur Asa (1991). *Media Analysis Techniques*. California: Sage Publication.
- Brackman, Arnold (1969). *The Communist Collapse in Indonesia*. New York: Norton.
- Chomsky, Noam dan Edward S. Herman (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon.
- Cribb, Robert (ed.) (2003). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965—1966*. Jakarta: Mata Bangsa.
- Crouch, Harold. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Currant, James and Michael Gurevitch (1991). *Mass Media and Society*. London: Edward Arnold.
- Denzin, Norman K (eds) (2000). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Dhakidae, Daniel (1991). *The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry*. A dissertation for the Degree of Ph.D. in Cornell University
- Entman, R.M (1993). "Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm." dalam *Journal of Communication*, Vol 43/4.
- Eriyanto (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- \_\_\_\_\_ (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fairclough, Norman (1998). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- \_\_\_\_\_ (1995). *Media Discourse*. New York: Edward Arnold.

- Feith, Herbert (2001). *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fiske, John (1982). *Introduction of Communication Studies*. London: Routledge.
- Guba, Egon G. (1990). *The Paradigm Dialog*. New York: Sage Books.
- Hall, Stuart (1992). *Culture, Media dan Language*. London: Routledge.
- Hardiman, Budi Francisco (1990). *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harsutejo (2003). *G 30-S Sejarah yang Digelapkan: Tangan berdarah CIA dan Rezim Soeharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Hill, David. T. (1995). *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Isak, Joesoef (ed.) (2001). *Dokumen CIA— Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965*. Jakarta: Penerbit Hasta Mitra.
- Ispardlarno, Lukas B. *Et al.* (eds.) (2002). *Media-Militer-Politik; Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*. Yogyakarta: Galang Press.
- Katoppo, Aristides *et al.* (eds) (2000). *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kolakowski, Leszek (1978). *Main Currents of Marxism III*. Oxford: Clarendon Press.
- Latif, Yid dan Idi Subandy Ibrahim (eds.) (1996). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Legge, J.D. (1972). *Soekarno, A Political Biography*. Sidney: Allen & Unwin.
- Littlejohn, Stephen (2002). *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Lull, James (1998). *Media, Komunikasi, Kebudayaan; Suatu Pendekatan Global*. Jakarta: YOI.
- Magnis-Suseno, Franz (1992). *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_ (1991). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia.
- Mannheim, Karl (1979). *Ideologi and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge.
- May, Brian (1978). *The Indonesian Tragedy*. Singapore: Graham Brash Ltd..
- McDonnell, Diane (1986). *Theories of Discourse: An Introduction*. Oxford: Basil Blackwall.
- Mcquail, Dennis (ed.) (2002). *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Mortimer, Rex (1974). *Indonesian Communism under Sukarno, Ideology and Politics 1959— 1965*. Ithaca: Cornell University.
- Muhaimin, Yahya A. (2002). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945—1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neuman, Lawrence W. (2000). *Social Research Methods*. London: Allyn and Bacon.

- Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh (1993). *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30-S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Raboy, Marc dan Bernard Dagenals (eds.). 1995. *Media, Crisis and Democracy: Mass Communication and the Disruption of Social Order*. London: Sage Publication
- Rallion, Francois (1989). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966—1974*. Jakarta: LP3ES.
- Ramadhan K.H. dan G. Dwipayana (1989). *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Biografi Presiden Soeharto*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung.
- Reese, Stephen D. (2001). *Framing Public Life*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publisher.
- Robinson, Richard (1988). *Indonesia: The Rise of Capital*. Australia: Sage Publication.
- Sen, Krishna dan David T. Hill (2001). *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Media Lintas Inti Nusantara.
- Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana (eds.) (2003). *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September—Pelengkap Nawaksara*. Jakarta: Meslass.
- Shoemaker, Pamela et al. (eds.) (1996). *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. London: Longman Group
- Smith, Edward C. (1983). *Sejarah Pembredelatan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
- Sumarkidjo, Atmadji. (2000). *Mendung di atas Istana Merdeka: Menyingkap Peran Biro Khusus PKI dalam Pemberontakan G 30-S*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sundhaussen, Ulf (1982). *Road to Power: Indonesian Military Politics 1945—1967*. London: Oxford University Press.
- Surjomihardjo, Abdurrachman (1980). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Deppen-Leknas LIPI.
- Sulistyo, Hermawan (1999). *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang terlupakan 1965—1966*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wieringa, Saskia E. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.
- Winters, Jeffrey A. (1999). *Power in Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa (Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Vatikiotis, Michail R..J. (1993). *Indonesian Politics under Soeharto, Order, Development and Pressure for Change*. New York: Routledge.

#### ■ Dokumentasi Koran

Berita Yudha (BY). 22 Mei 1965 – Desember 1965.

\_\_\_\_\_, 1 Januari 1966 – 12 Desember 1966.

\_\_\_\_\_, 20 Februari 1967 – 14 November 1967.

\_\_\_\_\_, 2 Januari 1968 – 27 November 1968.

Angkatan Bersenjata (AB), Oktober 1965 – Maret 1966.

\_\_\_\_\_, Januari 1967 - November 1967.

\_\_\_\_\_, Januari 1968 - November 1968.

### ■ Catatan

- <sup>1</sup> Sesungguhnya Gramsci meletakkan kritik baru terhadap proses kapitalisasi modern (dan hal ini melengkapi kritik Marx terhadap kapitalisme) yang cenderung mendominasi seluruh kehidupan manusia.
- <sup>2</sup> Tubs dan Moss dalam bukunya yang berjudul *Human Communication* mengatakan bahwa *communication involves sending messages from one person's nervous system to another's with the intention of creating a meaning similar to the one in the sender's mind. The verbal message does this through words, the basic elements of language, and words, of course, are verbal symbols.*
- <sup>3</sup> Shapiro mengatakan bahwa *a politics of discourse is inextricably tied to a politics of space. Moreover, this intimate relationship between space and discourse is no one between disparate modes. Because "space" is constituted by the way locations are imagined or given meaning, it is always already a largely discursive phenomenon.*
- <sup>4</sup> Soekarno dalam ajaran Ideologinya memperkenalkan sinergi politik antara unsur Nasionalis (NAS), unsur Agama (A) dan unsur Komunis (KOM), yang kemudian disingkat menjadi NASAKOM. Ajaran NASAKOM ini merupakan intisari pemikiran Soekarno yang mau menyatakan bahwa iklim Imperialisme dan kolonialisme rakyat Indonesia bisa terkilis dengan mengadakan sinergi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan atas unsur-unsur nasionalis, kaum agama dan praksis komunisme.
- <sup>5</sup> Soekarno dilihat sebagai penghalang keberhasilan penyebaran pengaruh kapitalisme liberal karena dia dianggap sebagai tokoh kunci yang mempunyai pengaruh yang sedemikian besar dalam usaha resistensi pengaruh kapitalisme liberal di Asia khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya.

